

DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan Aspek Kebutuhan Dasar Manusia	19
1.2	Model Analisis Interaktif (saran Miles dan Huberman)	26
2.1	Proses Nominasi dan Seleksi Penerima Hadiah Nobel Perdamaian .	57
2.2	Medali Hadiah Perdamaian	61
2.3	Diagram Perbandingan Jumlah Nominal Hadiah (1901-2007)	63
3.1	Peta Bangladesh	97
3.2	Logo Grameen Bank	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Selama ini kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat kuat terhadap stabilitas perdamaian. Ketika kemiskinan menjadi permasalahan global, maka sebuah proses terwujudnya perdamaian akan terganggu. Yang ada hanyalah perebutan atas sumber daya yang terbatas, yang akhirnya akan menimbulkan konflik-konflik baik dalam skala nasional maupun internasional.

Hal ini tidak terlepas dari sifat anarkisme politik global yang membuat dimensi keamanan mengalami pergeseran dari isu-isu *high politics* bergeser ke arah isu-isu *low politics*. Isu-isu *low politics* seperti isu kemiskinan, menjadi kajian para pengamat Hubungan Internasional di abad ke-21, dimana isu ini sudah menjadi isu *high politics* yang dapat mengancam keamanan manusia dari bentuk-bentuk kekerasan. Maka diperlukan sebuah upaya bersama dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan.

Namun, sungguh ironis sekali ketika selama ini isu kemiskinan global dalam dunia internasional hanya sebagai wacana, bukan sebagai bentuk aplikasi untuk mengatasi. Awal millenium baru dibuka oleh impian global sekaligus program kemanusiaan yang sangat megah. Para pemimpin dunia berkumpul di PBB pada tahun 2000 dan mengadopsi tekad bersejarah untuk mengurangi

WTC (*World Trade Center*) dan Pentagon dengan pesawat komersial pada tanggal 11 September 2001 memunculkan agenda baru keamanan internasional. Perang-perang terhadap kelompok teroris yang dipelopori Amerika Serikat mampu menggeser agenda keamanan internasional yang mulai tertuju pada agenda perang melawan terorisme. Seketika itu, impian dunia lewat PBB untuk mengurangi kemiskinan mulai tergelincir keluar.

Terpilihnya Muhammad Yunus dan Grameen Bank sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2006 memunculkan harapan lagi akan pentingnya upaya pengentasan kemiskinan bagi terwujudnya sebuah perdamaian. Bagi Muhammad Yunus, kemiskinan bukan lagi dilihat sebagai wacana, namun sudah menjadi kewajiban bersama untuk memberantasnya.

Bermula dari niat ikhlas untuk mengentaskan kemiskinan di Bangladesh, Muhammad Yunus dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian dari Institusi Nobel. Seperti kita tahu bahwa penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian oleh Institusi Nobel adalah salah satu pemberi subsidi bagi terwujudnya perdamaian dunia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus memiliki signifikansi tersendiri dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian.

Mengacu kepada hal tersebut, penulis merasa tertarik mengangkat persoalan tentang signifikansi upaya pengentasan kemiskinan oleh Muhammad Yunus dalam mewujudkan perdamaian tersebut dalam sebuah analisa penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang konkret dan dapat dikembangkan bagi ilmu

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui signifikansi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus terhadap upaya mewujudkan perdamaian.
2. Mengetahui peran yang dilakukan oleh Muhammad Yunus selama ini dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, sekaligus mengetahui juga paradigma dari Komite Nobel Norwegia akan makna perdamaian saat ini.
3. Memberikan sebuah pemahaman bahwa persoalan kemiskinan merupakan permasalahan bersama yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama. Apalagi isu ini pada kenyataannya menjadi sebuah persoalan tingkat tinggi (*high politics*) yang mampu mengancam keamanan manusia.
4. Mengajak para stakeholder, baik pemerintah, akademisi, maupun pemerhati masalah kemiskinan, politik, dan hubungan internasional untuk bersama-sama

C. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya sebuah perdamaian adalah kewajiban setiap negara atas rakyat yang ada di dalamnya. Menikmati sebuah kehidupan yang damai dan aman adalah hak setiap warga negara yang hidup di suatu negara yang berdaulat. Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen, paling sedikit ada lima nilai dasar sosial yang biasanya kita harapkan dijaga oleh negara, yaitu: keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹

Sebagian besar masyarakat biasanya menerima demikian adanya nilai-nilai dasar tersebut. Mereka baru menyadari nilai-nilai itu ketika telah terjadi kesalahan, seperti selama perang atau depresi, ketika segala sesuatu mulai berada di luar kendali negara-negara individu. Sebagian besar negara mungkin bersahabat, tidak mengancam dan mencintai perdamaian, tetapi sebagian kecil negara mungkin bermusuhan dan agresif, dan tidak ada pemerintahan dunia yang mencegah mereka.

Munculnya Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin semakin menyadarkan masyarakat internasional akan arti pentingnya menjaga perdamaian internasional. Kesadaran akan terwujudnya perdamaian, negara-negara di dunia bekerjasama membentuk organisasi-organisasi internasional, seperti LBB (*Liga Bangsa-Bangsa*) pada saat Perang Dunia I, maupun PBB (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*) pada saat Perang Dunia II yang sampai sekarang masih diakui sebagai badan internasional untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Begintan Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar

Selain membentuk organisasi-organisasi internasional, negara-negara di dunia juga menciptakan sebuah sistem hukum internasional. Hukum-hukum internasional diciptakan agar negara-negara di dunia mentaati peraturan yang ada demi terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional. Seperti konsep *world order* yang diperkenalkan presiden Amerika Serikat (AS) George Bush pasca Perang Dingin pada tahun 1990, yang pengertiannya adalah tatanan dunia yang berdasarkan pada hukum internasional.

Namun, meskipun organisasi maupun hukum internasional diciptakan, perang-perang dunia maupun pelanggaran atas hukum internasional masih terus berjalan yang berdampak pada ketidakstabilan keamanan internasional, seperti perang Afghanistan (2001) maupun perang Irak (2003).

Terlepas dari segala bentuk penyimpangan yang terjadi, upaya komunitas internasional untuk mewujudkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di seluruh dunia harus berdasarkan atas hukum internasional yang ada, hak PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB.² PBB merupakan pemain penting dalam upaya yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, namun pemain lainnya juga dapat berperan penting dalam upaya tersebut.

Salah satunya datang dari Institusi Nobel, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh Alfred Nobel sejak tahun 1900. Institusi Nobel dibentuk untuk memberikan penghargaan berupa hadiah Nobel bagi orang-orang yang berprestasi dan memberikan kontribusi besar dibidang-bidang tertentu, salah satunya yaitu dibidang perdamaian dengan Hadiah Nobel Perdamaian (*Nobel Peace Prize*).

² Departemen Luar Negeri Norwegia, *Upaya Perdamaian dan Rekonsiliasi Norway di Area*

Sejak tahun 1901, pemberian Hadiah Nobel Perdamaian berangkat dari realitas dunia yang penuh dengan peristiwa-peristiwa konflik dan kekerasan antar umat manusia, baik kekerasan yang diorganisasi dalam bentuk perang maupun konflik antar bangsa. Sehingga para penerima Hadiah Nobel Perdamaian adalah orang-orang maupun organisasi yang melakukan perjuangan dan pengorbanan memberikan kontribusi besar dalam mengupayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Hadiah Nobel Perdamaian adalah hadiah prestisius yang mampu mengangkat nama orang-orang maupun organisasi yang menerima hadiah ini dan menjadikannya pusat perhatian internasional. Selama ini Komite Nobel menggunakan Hadiah Nobel Perdamaian untuk mendorong tokoh-tokoh kunci yang sedang mengupayakan perdamaian yang nyaris hilang agar tetap bersemangat.³ Tidak seperti penghargaan Nobel lainnya, penghargaan Nobel Perdamaian diberikan kepada orang atau organisasi yang masih dalam proses penyelesaian masalah, dan bukan penyelesaian masalah. Dengan begitu, penghargaan Nobel Perdamaian berbeda dengan seluruh penghargaan Nobel lainnya.

Salah satu penerima Hadiah Nobel Perdamaian adalah tokoh yang berasal dari Bangladesh, yaitu Muhammad Yunus⁴ bersama Grameen Bank yang didirikannya. Muhammad Yunus dan Grameen Bank adalah penerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006. Hadiah Nobel Perdamaian dianugerahkan oleh

³ Kompas, 17 Oktober 2000.

⁴ Muhammad Yunus adalah seorang dekan sekaligus dosen yang mengajar di fakultas ekonomi di Universitas Chittagong. Setelah Yunus, ada beberapa mandapat gelar PhD dari Vanderbilt

Komite Nobel Norwegia kepada Muhammad Yunus dan Grameen Bank pada tanggal 13 Oktober 2006 di Oslo, ibukota Norwegia.

Berawal dari bencana kelaparan yang melanda Bangladesh pada tahun 1974, Muhammad Yunus berusaha untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa Bangladesh. Sebuah penelitian yang dilakukannya dalam bidang ekonomi pedesaan menjadi titik awal diluncurkannya sebuah proyek kredit mikro untuk kaum miskin pedesaan. Proyek ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan kemudian diformalkan menjadi sebuah institusi legal yang bernama Grameen Bank. Proyek kredit mikro bebas bunga ini pertama kali diaplikasikan untuk membantu kemiskinan yang melanda di Bangladesh, tepatnya di desa Jobra.

Bangladesh adalah salah satu negara di kawasan Asia Selatan dengan ibu kota sekaligus juga kota terbesar di Bangladesh yaitu Dhaka. Negara ini berusaha memisahkan diri dari pemerintahan Pakistan dan memperoleh kemerdekaannya pada 16 Desember 1971. Saat perang berakhir, Bangladesh adalah sebuah negara yang luluh lantah. Perekonomiannya hancur dan jutaan orang membutuhkan rehabilitasi. Bangladesh dilanda oleh bencana kelaparan pada tahun 1974 selepas memperoleh kemerdekaannya dari Pakistan. Selain itu, Bangladesh juga merupakan negara langganan banjir karena letak geografis wilayahnya dikuasai oleh delta Gangga-Brahmaputra. Sehingga tidak mengherankan apabila negara ini mendapat julukan *International Basketplace*,⁵ yakni kemiskinan yang sangat parah.

⁵ _____, *Grameen Bank*, diakses 16 Oktober 2007 dari <http://uite.dun.klccnet.com/2007/06/grameen-bank.html>

Muhammad Yunus yang memiliki sebutan *Banker of The Poor*⁶ memang benar-benar berhasil menghidupkan roda perekonomian Bangladesh. Dengan proyek kredit mikro untuk kaum miskin pedesaan, Muhammad Yunus bersama Grameen Bank telah mendorong aktivitas perekonomian di Bangladesh.

Apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus bersama Grameen Bank ini merupakan bentuk resonansi dari Sidang Umum PBB tahun 2000 yang menyepakati Tujuan Pembangunan Abad Milenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)*. Sebanyak 189 pemimpin dunia berkumpul di PBB pada bulan September 2000 menyetujui pembentukan delapan tujuan yang apabila tercapai akan mengurangi kemiskinan di dunia sampai separuhnya pada 2015. Isi dari delapan Tujuan Pembangunan abad Milenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)*⁷ antara lain: (a) memberantas kemiskinan dan kelaparan, (b) mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, (c) mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, (d) mengurangi tingkat kematian anak, (e) meningkatkan kesehatan ibu, (f) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain, (g) menjamin kelestarian lingkungan, dan (h) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Para pemimpin dunia yang tergabung dalam anggota PBB berusaha untuk mengurangi kemiskinan yang melilit kehidupan sekitar 1,2 miliar penduduk dunia dengan indikator pendapatan kurang dari satu dollar AS per hari.⁸ MDGs tidak

⁶ *Ibid.*

⁷ Keterangan lebih lanjut bisa dilihat dalam United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 2003 (Millenium Development Goals: A compact among nations to end human poverty)*, Oxford University Press, New York, 2003, di akses 19 Oktober 2007 dari <http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_complete.pdf>

⁸ Kompas, 18 Oktober 2007.

hanya menggarisbawahi penting sekaligus gentingnya kemiskinan sebagai salah satu persoalan pokok global, tetapi memposisikan sebagai hulu dari banyak persoalan lain. Namun, munculnya peristiwa 11 September 2001 dan Perang Irak membuat tekad bersejarah para pemimpin dunia tergelincir keluar dari upaya mengejar impian itu. Perhatian para pemimpin dunia beralih dari perang melawan kemiskinan menjadi perang melawan terorisme. Hingga kini lebih dari AS\$530 miliar dihabiskan untuk perang di Irak oleh AS saja.⁹

Terpilihnya Muhammad Yunus dan Grameen Bank sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2006 menunjukkan bahwa Komite Nobel Norwegia berupaya memasukkan isu kemiskinan ke dalam agenda perdamaian internasional. Kemenangan ini dinilai sebagai sebuah kemajuan dari Komite Nobel Norwegia untuk memperluas jangkauan perdamaian. Hal ini dikarenakan penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian selama ini selalu dikaitkan dengan perang, perlucutan senjata, pengurangan, atau penghapusan pasukan.¹⁰

Agenda keamanan internasional abad-21 mengalami transformasi dari isu-*isu high politics* ke isu-isu *low politics*, bahkan akan lebih memfokuskan pada keamanan manusia (*human security*). Salah satunya yaitu dimensi keamanan ekonomi yang akan membebaskan manusia dari kemiskinan. Hal ini didasarkan atas pergeseran aktor kekuatan global pasca Perang Dingin yang mempengaruhi dimensi keamanan internasional yang selama ini didominasi oleh isu-isu *high politics*. Ketika agenda keamanan mengalami transformasi, maka fokus perdamaian pun juga akan mengalami transformasi yang sama.

⁹ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, Marjin Kiri, Serpong, 2007, hal. 257.

¹⁰ Kompas, 16 Oktober 2007.

Selama ini perdamaian cenderung ditafsirkan sebagai upaya terbebas dari penjajahan, penindasan, atau tekanan politik. Namun realitas menunjukkan, bentuk penjajahan dan tekanan bukan hanya berupa tekanan fisik. Bentuk penjajahan dan tekanan di era global bisa bersifat amat halus, bahkan sering memiliki kekuatan legal. Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai hasil penjajahan non-fisik. Oleh karena itu, perdamaian akan tetap menjadi isu membara selama tingkat kemiskinan yang menjadi penyebab ketidakdamaian di dunia masih sangat besar.

Pesan Muhammad Yunus dan Grameen Bank dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan kredit mikro akhirnya ditangkap oleh Komite Nobel Norwegia dan menganugerahinya Hadiah Nobel Perdamaian. Menurut keputusan Komite Nobel Norwegia, Muhammad Yunus dan Grameen Bank mendapat hadiah “atas dasar pembangunan sosial dan ekonomi yang dilakukan dari bawah (*for their efforts to create economic and social development from below*)” dalam upayanya untuk mewujudkan perdamaian. Dengan adanya penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian 2006 tersebut, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus mampu memberikan signifikansi tersendiri bagi upaya terwujudnya sebuah perdamaian.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana signifikansi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus terhadap upaya terwujudnya perdamaian?

E. Kerangka Berpikir

Untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua sudut pandang, yaitu dari Komite Nobel Norwegia dan dari Muhammad Yunus. Atas dasar tersebut, penulis menggunakan dua teori dari masing-masing sudut pandang. Konsep *human security* digunakan untuk melihat sudut pandang dari Komite Nobel Norwegia, dan pendekatan pembangunan sebagai perdamaian (*Development as Peace*) untuk melihat sudut pandang dari Muhammad Yunus.

1. Konsep *Human Security*

Masalah utama yang hendak disorot melalui konsep keamanan manusia adalah dominasi negara dan aparatnya dalam mendefinisikan, membuat serta menerapkan kebijakan keamanannya. Negara umumnya mengatasnamakan persatuan, kedaulatan, dan stabilitas nasional dalam membenarkan segala kebijakan keamanan berikut implementasinya di lapangan, sekalipun melalui upaya-upaya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Hal ini acapkali menimbulkan penderitaan yang hebat bagi sebagian besar individu. Karena adanya represi dari negara terhadap individu dan masyarakatnya inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu utama munculnya desakan bagi implementasi kebijakan keamanan yang lebih komprehensif, termasuk dengan memasukkan komponen-komponen keamanan manusia. Beberapa kasus di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin yang berkenaan dengan adanya dominasi yang berlebihan dari negara dalam bidang keamanan menunjukkan bagaimana

komponen manusia telah dipinggirkan dari keseluruhan proses penataan dan manajemen keamanan nasional.¹¹

Pergeseran paradigma *state security* menuju *human security* merupakan sebuah revolusi dalam memahami aktualisasi resolusi konflik yang lebih humanis, karena memasukkan unsur-unsur kebutuhan dan kepentingan orang per orang akan keamanan yang lebih komprehensif. Tabel berikut akan menunjukkan transformasi paradigma *state security* menuju *human security*.

Tabel 1.1
Perubahan Paradigmatik *State Security* Menuju *Human Security*

	State Security	Human Security
Fokus	Negara	Individu, rumah tangga, masyarakat
Ancaman	Ancaman terhadap batas teritorial	Ancaman tanpa garis batas, seperti: pencemaran lingkungan, infeksi penyakit, terorisme
Aktor	Negara (tokoh politik, militer)	Cakupan lebih luas (NGO)
Tujuan	Melindungi negara	Melindungi dan memberdayakan manusia

Sumber: Bishop Antonio J. Ledesma, S.J., *Local Perspectives and Initiatives in Peacebuilding*, GZOPI, Quezon City, 2005, hal. 14.

United Nations yang juga merupakan sponsor dari paradigma baru ini, melalui Sekretaris Jenderal Kofi Annan mendefinisikan *human security* sebagai berikut:

Segera sesudah konflik ini, sebuah pemahaman baru dari konsep keamanan sedang dikembangkan. Sepintas bersinonim dengan pertahanan wilayah dari serangan eksternal, kebutuhan keamanan hari ini datang untuk merangkul atas perlindungan individu dan masyarakat dari kekerasan internal. Kebutuhan akan sebuah pendekatan yang lebih berpihak pada manusia atas keamanan diperkuat oleh adanya keberlanjutan bahaya senjata pemusnah massal, khususnya senjata nuklir, yang mengancam umat manusia: nama

¹¹ Landry Haryo Subianto, *Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek*, dalam Analisis CSIS Tahun XXXI/2002 No. 1, CSIS, Jakarta, 2002, hal. 104-105.

mereka mengungkapkan lingkup dan sasaran yang mereka harapkan, jika mereka pernah gunakan.¹²

Kita harus pula meluaskan pandangan kita dari apa yang dimaksud dengan perdamaian dan keamanan. Damai berarti lebih banyaknya ketidakhadiran perang. Keamanan manusia tidak bisa lagi dipahami di dalam terminologi militer semata. Melainkan, itu harus meliputi pembangunan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, demokratisasi, perlucutan senjata, dan penghormatan atas hak azasi manusia dan peraturan hukum.¹³

Permintaan yang kita hadapi juga mencerminkan sebuah pertumbuhan konsensus bahwa keamanan kolektif tidak bisa lagi digambarkan sebagai ketidakhadiran konflik bersenjata, apakah itu antar negara maupun di dalam negara sendiri. Penyalahgunaan hak azasi manusia, pengusiran populasi warganegara secara besar-besaran, terorisme internasional, penyakit AIDS, perdagangan narkoba dan senjata, dan bencana lingkungan yang menyajikan suatu ancaman langsung ke arah keamanan manusia, memaksa kita untuk mengadopsi sebuah pendekatan yang terkoordinir lebih jauh bagi isu yang bergeser.¹⁴

Human security, dalam pengertian yang paling luas, merangkul jauh lebih dari ketidakhadiran kekerasan konflik. Itu meliputi hak azasi manusia, pemerintahan yang bersih, akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan dan memastikan bahwa masing-masing individu mempunyai aneka pilihan dan peluang untuk memenuhi potensinya. Tiap-tiap langkah dalam arahan ini adalah juga suatu pendalaman ke arah pengurangan kemiskinan, menuju keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan pencegahan konflik. Terbebas dari kekurangan (*freedom from want*), terbebas dari ketakutan (*freedom from fear*), dan kebebasan dari generasi masa depan untuk mewarisi sebuah lingkungan alam yang sehat – ini menjadi blok bangunan manusia yang saling terhubung – dan juga keamanan nasional.¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi *human security* adalah sebagai

berikut:

¹² Kofi Annan (Sekretaris Jenderal PBB), *Millennium Report, Chapter 3*, hal. 43-44, diakses 22 Agustus 2001 dari <<http://www.un.org/millennium/sg/report/full.htm>>

¹³ Kofi Anan, *Towards a Culture of Peace*, diakses 24 November 2007 dari <<http://www.unesco.org/opi2/lettres/TextAnglais/AnnanE.html>>

¹⁴ Kofi Anan, *Report of the Secretary-General on The Work of the Organization*, dokumen resmi Majelis Umum dalam 55 kali sidang, Lampiran No. 1 (A/55/1), United Nations, New York, 2000, hal. 4, diakses 24 November 2007 dari <<http://www.un.org/documents/sg/report00/a551e.pdf>>

¹⁵ Kofi Anan, *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia*, dua hari rapat di Ulaanbaatar, 8-10 Mei 2000, Press Release SG/SM/7382, diakses 24 November 2007 dari <<http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgm7382.doc.html>>

- melindungi kebebasan yang paling fundamental
- melindungi manusia dari ancaman berbahaya dan tersebar
- menggunakan proses yang berdasar pada kekuatan dan cita-cita masyarakat
- menciptakan sistem (sosial, ekonomi, politik, budaya) yang bersama-sama membantu masyarakat untuk mencapai kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat
- bergabung dengan agenda utama dari perdamaian, keamanan, dan pembangunan
- meliputi: terbebas dari kekurangan, terbebas dari ketakutan, dan kebebasan untuk memiliki lingkungan yang sehat¹⁶

Menurut Human Development Report 1994 yang dikeluarkan oleh UNDP, keamanan manusia mengandung dua aspek penting, yakni (a) keamanan manusia dari ancaman-ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi; (b) menyangkut perlindungan atas pola-pola kehidupan harian seseorang – baik di dalam rumah, pekerjaan, atau komunitas – dari gangguan-gangguan yang datang secara tiba-tiba serta menyakitkan.¹⁷ UNDP juga mengidentifikasi tujuh kategori ancaman terhadap *human security*:

1. economic security (contoh: terbebas dari kemiskinan);
2. food security (contoh: akses ke makanan);
3. health security (contoh: akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan perlindungan dari penyakit);
4. environmental security (contoh: perlindungan dari hal-hal yang berbahaya seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan);
5. personal security (contoh: keselamatan fisik dari hal-hal seperti penyiksaan, perang, serangan kriminal, kekerasan domestik, penggunaan narkoba, bunuh diri, dan bahkan kecelakaan lalu lintas);
6. community security (contoh: keberlangsungan kebudayaan tradisional dan kelompok etnis seperti halnya juga keamanan fisik atas kelompok ini); dan
7. political security (contoh: menikmati hak-hak sipil dan politik, dan terbebas dari tekanan politik).

¹⁶ Bishop Antonio J. Ledesma, S.J., "Local Perspectives and Initiatives in Peacebuilding", GZOPI, Quezon City, 2005, sebagaimana dikutip dalam *Waging Peace in the Philippines and Asia: Facilitating Processes, Consolidating Participation*, GZOPI dan UNDP Philippines, Quezon City, 2005, hal. 15.

¹⁷ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1994*, Oxford University Press, New York, 1994, hal. 23, diakses 24 November 2007 dari http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf

Konsep *human security* memiliki empat karakteristik esensial, yakni bahwa (a) konsep *human security* bersifat universal; (b) keamanan manusia memiliki komponen yang saling berkaitan (*interdependen*); (c) pencegahan merupakan langkah terbaik dalam memastikan tercapainya *human security*; dan (d) berbasis pada penduduk (*people-centered*).¹⁸ *Human security* merupakan “*ethical framework*” dalam *peacemaking* dan *peacebuilding* karena membahas mengenai konsep keamanan komprehensif untuk semua.

Renner¹⁹ mencatat bahwa konsepsi keamanan manusia juga meliputi beragam aspek lainnya, seperti: perdamaian, perlindungan lingkungan, penghormatan atas HAM, serta demokrasi.

2. Pendekatan Pembangunan sebagai Perdamaian (*Development as Peace*)²⁰

Tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu. Karena itu, pembangunan didefinisikan secara amat kontekstual dan harus merupakan konsep terbuka, yang harus didefinisikan kembali terus menerus, seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang proses maupun sejalan dengan munculnya persoalan baru yang perlu dipecahkan dengan “pembangunan”.²¹

¹⁸ Gary King dan Christopher Murray, *Pengkajian Ulang Keamanan Manusia*, Department of Government of Harvard University, Cambridge, 2000, hal. 5.

¹⁹ Dikutip dari Ann M. Florini dan P.J. Simmons, ‘North America,’ 1997, dalam Paul B. Stares (ed.), “The New Security Agenda: A Global Survey,” JCIE, New York, 1998, sebagaimana dikutip Landry Haryo Subianto, *op cit*, hal. 106-107.

²⁰ Lihat Lambang Trijono dalam *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

²¹ Lihat Bjorn Hettne dalam *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*, PT Gramedia Pustaka Utama,

Menurut Galtung, pembangunan didefinisikan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.²²

UNESCO pernah mengungkapkan bahwa titik tekan tujuan pembangunan di masa depan adalah untuk membangun manusianya bukan pada membangun benda-benda yang bersifat fisik (*the goals, aims and objectives of the development to be not to develop things but to develop people*).²³ Implikasinya adalah bahwa pembangunan haruslah lebih ditujukan pada peningkatan pencapaian spiritual, moral dan material manusia seutuhnya, baik selaku individual maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Pendekatan pembangunan sebagai perdamaian merupakan pendekatan alternatif, alternatif dari pendekatan arus utama (*mainstream development*) untuk mengatasi sumber-sumber konflik dan kekerasan di masyarakat. Bjorn Hettne menyebut perspektif pembangunan perdamaian merupakan titik balik pemikiran pembangunan dari arah lain, dari aras lokal dan arus bawah, sebagai alternatif dari model pembangunan arus utama, kapitalisme dan sosialisme (*counterpoint development thinking to mainstream development*).²⁴

²² Johan Galtung *et.al.*, 'Why the Concern with Ways of Life', GDIP project, United Nation University, dalam "The Western Development Model and Life Style", Council for International Development Studies, Oslo, 1980, sebagaimana dikutip Lambang Trijono, *op cit*, hal. 3.

²³ Dikutip dalam Aang Abu Bakar Yusuf, *Relasi Community Empowerment (Pemberdayaan Masyarakat) dengan Perdamaian*, diakses 5 November 2007 dari <<http://www.csrc.or.id/artikel/?Berita=071304022110&Kategori=28>>

²⁴ Bjorn Hettne, *Peace and Development: Contradiction and Compatibilities*, Journal of Peace Research Vol. 20 No. 4, 1983, sebagaimana dikutip Lambang Trijono, *op cit*, hal. 26.

Pendekatan pembangunan sebagai perdamaian didasarkan pada tiga asumsi dasar, yaitu: (a) pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi manusia untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kekerasan, kemiskinan, represi, ketidakamanan, dan alienasi budaya; (b) pembangunan dijalankan oleh struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik, negara dan pasar, yang tidak menekan, sebaliknya membebaskan dan meningkatkan kapasitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya perdamaian; dan (c) strategi, perencanaan, dan kebijakan pembangunan harus peka konflik dan mampu mendorong (*generate*) perdamaian.

Perdamaian (*peace*) di sini tidak harus diartikan secara sempit sebagai resolusi konflik, sebagaimana dipahami orang selama ini. Tetapi lebih dari itu, merupakan segala prakarsa dan upaya kreatif manusia, termasuk kreatif dalam praktek dan kebijakan pembangunan, untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, struktural, kultural maupun personal, di masyarakat.²⁵ Dalam pengertian yang lain lagi, perdamaian adalah kondisi dalam ruang untuk pembangunan tanpa kekerasan.²⁶

Melalui pendekatan pembangunan sebagai perdamaian ini, kita diajak untuk menjadikan prinsip dan nilai perdamaian, baik dalam arti nir-kekerasan (*non-violence*) maupun dalam arti upaya kreatif manusia untuk mencegah, menyelesaikan dan mentransformasi konflik, sebagai acuan dasar dalam proses pembangunan. Berdasar prinsip dan nilai perdamaian ini, pembangunan diprioritaskan untuk menciptakan kondisi perdamaian melalui terpenuhinya

²⁵ Lihat Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan*, p. 1.

kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup warga negara, sebagai upaya untuk mengatasi sumber konflik dan akar-akar kekerasan di masyarakat. Upaya demikian dilakukan dengan strategi dan cara-cara damai sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerusakan, baik kehidupan sosial maupun lingkungan hidup.

a. Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Hak Azasi Manusia

Pendekatan pembangunan sebagai perdamaian dilandasi oleh cara pandang holistik dan universal dalam merumuskan kebutuhan hidup manusia. Pembangunan di sini dimaknai sebagai tujuan dan sarana untuk meningkatkan kapasitas manusia dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup yang penuh makna, sehingga manusia terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik struktural maupun kultural, yang dapat menghambat kapasitas manusia berkembang secara optimal.

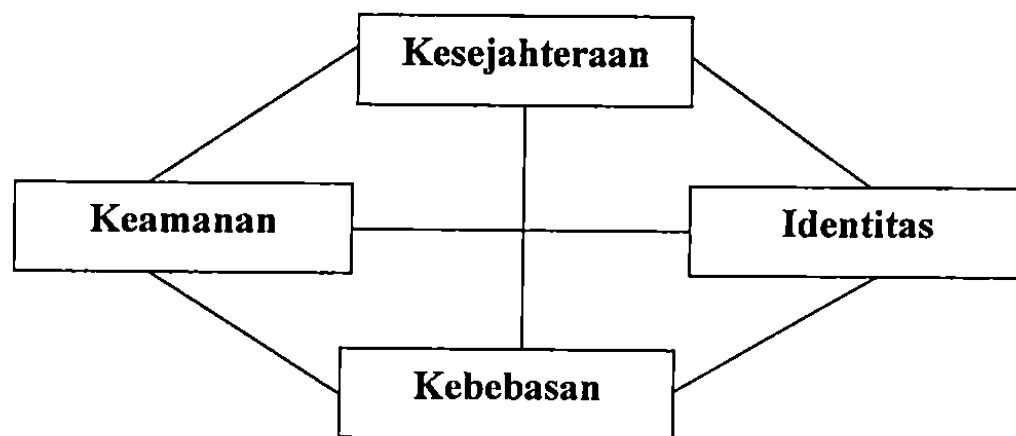
Pembangunan dalam hal ini diarahkan untuk realisasi potensi-potensi sumberdaya manusia secara optimal, berpijak pada pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup, yang harus dipenuhi untuk hidup layak sebagai manusia, agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, melalui terpenuhinya empat jenis kebutuhan dan hak-hak dasar dalam hidup, yaitu:²⁷

- 1) Kesejahteraan;
- 2) Kebebasan;
- 3) Keamanan; dan
- 4) Identitas budaya

²⁷ Johan Galtung, *loc cit* 1990, sebagaimana dikutip Lembaga Tejiang, op. cit. hal. 8

Pembangunan sebagai perdamaian menjadikan ketersediaan dan keterpenuhinya keempat kebutuhan dasar tersebut sebagai prasyarat penting terwujudnya perdamaian di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang satu diarahkan untuk memperkuat (*reinforcing*) pemenuhan kebutuhan dasar yang lain.

Gambar 1.1
Keterkaitan Aspek Kebutuhan Dasar Manusia



Sumber: Lambang Trijono, *Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 14.

Keempatnya bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi sekaligus sebagai hak-hak azasi dalam hidup yang harus dipenuhi, baik oleh negara, masyarakat, maupun individual.²⁸ Karena itu, kelangkaan dan tidak terpenuhinya keempat kebutuhan dasar itu akan menyebabkan manusia terjebak dalam empat jenis kekerasan, yaitu: (1) kemiskinan; (2) represi; (3) kerusakan; dan (4) alienasi budaya.

²⁸ Johan Galtung, "Peace by Peaceful Means, Peace and Conflict, Development and Civilization, Sage Publications, London, 1996.

b. Pembentukan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi dan Politik Yang Tidak Menekan

Di sisi lain, pembangunan sebagai perdamaian menekankan pembentukan struktur dan kelembagaan ekonomi dan politik untuk menjalankan pembangunan sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan merealisasikan potensi dan mengembangkan kapasitas manusia secara optimal. Sebaliknya, struktur dan kelembagaan politik dan ekonomi, negara atau pasar, yang menekan dan menghambat realisasi potensi dan kapasitas manusia sangat ditentang oleh pendekatan ini.

Pendekatan ini sangat menekankan pentingnya kelembagaan ekonomi berskala kecil, yang memungkinkan penduduk mampu mengaksesnya secara bebas dan terbuka, disertai kelembagaan politik yang demokratis sehingga memungkinkan penduduk bebas menyuarakan dan mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhannya dalam proses kebijakan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya institusi negara yang mampu melindungi dan menjamin keamanan warga negara, serta kelembagaan kultural yang mengakui dan mampu menumbuhkan harga diri identitas kelompok, sehingga kapasitas kultural warga masyarakat bisa berkembang secara optimal.

c. Strategi, Perencanaan, dan Kebijakan Pembangunan Peka Konflik
(Conflict Sensitive Development)

Dari sudut pandang perdamaian, pembangunan merupakan sarana untuk merealisasikan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sekaligus membebaskan manusia dari berbagai bentuk kekerasan. Pembangunan digunakan sebagai sarana

untuk mengubah kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan di masyarakat, dan memberi jalan keluar menuju perdamaian.

Konflik (*conflict*) dan perdamaian (*peace*) merupakan dua hal yang berbeda; konflik bukan semata keadaan tanpa perdamaian atau sebaliknya perdamaian bukan semata keadaan tanpa konflik. Di antara kedua konsep ini, konsep lain yaitu kekerasan (*violence*) perlu ditambahkan. Tidak semua konflik adalah kekerasan. Hanya konflik yang tidak teratasi secara damai yang disebut kekerasan. Di sini perdamaian bukan hanya diartikan sebagai keadaan tanpa konflik dan kekerasan (*negative peace*), tetapi segala jenis upaya kreatif manusia untuk mengatasi agar konflik tidak jatuh menjadi kekerasan (*positive peace*).²⁹

Konflik sendiri selalu terjadi dalam kehidupan normal dan hubungan antarmanusia. Konflik berlangsung ketika terjadi ketidaksesuaian (*incompatibilities*) dalam hal tujuan dan cara di antara berbagai pihak berkaitan dengan soal untuk apa sesuatu sumberdaya-sumberdaya penting di masyarakat seharusnya digunakan dan bagaimana cara menggunakannya.³⁰ Konflik dalam pembangunan bisa terjadi berkaitan dengan soal substansi, nilai atau tujuan pembangunan, bisa juga berkaitan dengan soal strategi dan cara bagaimana pembangunan dipilih dan dijalankan.

Kekerasan, di sisi lain, berbeda dengan konflik. Kekerasan terjadi ketika sesuatu konflik, baik dalam arti kondisi maupun tindakan, tidak bisa diselesaikan secara damai. Kekerasan merupakan kondisi atau tindakan yang semestinya bisa

²⁹ Lihat Johan Galtung, *op cit*, 2003, dalam sub bab "Studi Perdamaian: Beberapa Paradigma Dasar."

³⁰ Simon Fisher, et al., "Working with Conflict, Skills and Strategies for Action," London, *Peace and Conflict (PAC)*, 2000, sebagaimana dikutip Lambang Trieno, *op cit* hal. 47.

dihindari, sedemikian rupa sehingga aktualisasi kemampuan atau kapasitas aktual manusia berada di bawah potensi kemampuan atau kapasitasnya.³¹ Hal ini bisa terjadi karena berbagai sebab, bisa karena tekanan-tekanan dalam hidup, represi politik dan ketidakamanan, atau karena belenggu kemiskinan atau tiadanya sarana-sarana dan peluang-peluang dalam hidup. Kekerasan dengan demikian merupakan kondisi atau tindakan yang menghambat realisasi potensi dan kapasitas manusia.

Pembangunan sebagai perdamaian dimaksudkan untuk menghilangkan dan mengatasi kekerasan ini, menghilangkan kondisi dan tindakan yang menghambat realisasi potensi dan pengembangan kapasitas manusia. Pembangunan dalam arti ini merupakan upaya kreatif manusia untuk mengatasi sumber-sumber kekerasan, mengatasi dan mengubah konflik agar tidak menjadi kekerasan.

Menjadikan pembangunan sebagai sarana efektif untuk mengatasi konflik dan kekerasan di masyarakat membutuhkan praksis dan kebijakan pembangunan yang peka terhadap konflik sekaligus mampu mendorong perdamaian, dengan memasukkan analisis konflik dan perdamaian dalam praksis dan kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pendekatan pembangunan peka konflik (*conflict sensitive development*) ini perlu dilakukan di berbagai aktivitas pembangunan, di sektor ekonomi, sosial, politik, keamanan dan budaya, nasional maupun global.

³¹ Johan Galtung, "Peace: Education and Action, Essays in Peace Research," Volume I, Oslo, 1976, hal. 1076.

F. Hipotesa

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dan dibantu oleh teori dalam memetakannya, maka penulis menduga bahwa:

- a. Telah terjadi pergescran paradigma dari Komite Nobel Norwegia akan makna perdamaian saat ini. Perdamaian bukan hanya terkait dengan penyelesaian konflik dan kekerasan, melainkan langsung menyangkut kepentingan manusia, yakni terbebas dari ketakutan dan terbebas dari kekurangan yang diakibatkan oleh kemiskinan.
- b. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus memiliki signifikansi dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian. Penulis berasumsi bahwa program pengentasan kemiskinan oleh Muhammad Yunus mampu memenuhi ketiga asumsi dasar pembangunan sebagai perdamaian (*Development as Peace*) terhadap kaum miskin di Bangladesh dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian untuk menyusun tulisan terdiri dari jangkauan waktu (*time*) dan jangkauan pembahasan (*field*). Jangkauan waktu penelitian ini dibatasi sejak kemiskinan melanda Bangladesh yaitu tahun 1974 sampai 13 Oktober 2006, yaitu saat pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 2006 kepada Muhammad Yunus dan Grameen Bank. Sedang jangkauan pembahasan penelitian ini dibatasi pada dua kajian, yaitu (a) paradigma Komite Nobel Norwegia tentang makna perdamaian, dan (b) peran yang dilakukan oleh Muhammad Yunus

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu.³² Penelitian ini memuat perpaduan dari analisis literatur dan analisis sejarah (*librarian analysis and historical analysis*). Analisis literatur adalah suatu teknik penelitian dengan menggunakan acuan dari peninggalan-peninggalan tertulis.³³ Sedangkan analisis sejarah adalah penyelidikan yang mengaplikasikan perspektif historik pada suatu masalah.³⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data sekunder. Ini berarti data-data yang dibutuhkan pada penelitian berasal dari buku, catatan-catatan (elektronik dan non-elektronik), makalah, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan penunjang yang amat penting dalam keberhasilan penelitian.

3. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti saran Miles dan Huberman dengan model analisis interaktif³⁵, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga tahap: mereduksi data, menyajikan data, dan

³² J. Suprpto, *Metode Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 14.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik Edisi Tujuh*, Tarsito, Bandung, 1990, hal. 132.

³⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang*

kemudian menarik kesimpulan sehingga data yang terkumpul berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Sajian data (*data display*)

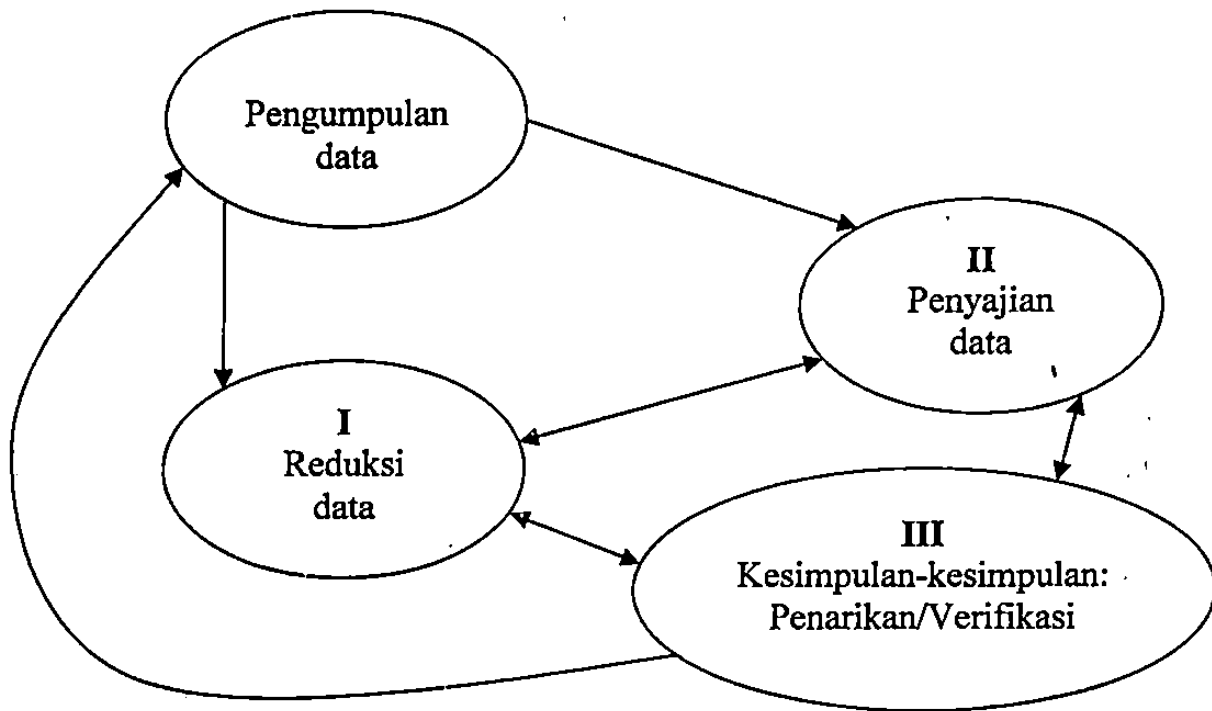
Sajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Menarik kesimpulan/verifikasi (*concluding drawing*)

Menarik kesimpulan dilakukan setelah reduksi data dan sajian data disusun. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir atau dirasa cukup oleh peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga divalidasi selama penelitian berlangsung untuk divi-

Hubungan interaktif antar ketiga komponen tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 1.2
Model Analisis Interaktif (saran Miles dan Huberman)



Sumber: Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: *Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Denpasar: Universitas Indonesia (UI-Press)

I. Rencana Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini akan ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi antara lain: alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PERGESERAN PARADIGMA PERDAMAIAN

Pada bab ini penulis akan menaparkan tentang pergeseran paradigma perdamaian yang turut mempengaruhi pergeseran paradigma Komite Nobel Norwegia dalam proses penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian. Untuk mendukung sub bahasan ini, penulis akan menjelaskan tentang Institusi Nobel secara utuh, adanya pergeseran kekuatan global, dan pergeseran dimensi keamanan saat ini.

BAB III PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MUHAMMAD YUNUS

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang program-program dari Muhammad Yunus dalam mengatasi kemiskinan di Bangladesh, antara lain: program kredit mikro, Grameen Bank I, dan Grameen Bank II. Namun terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran

sosiologis masyarakat Bangladesh dan kondisi kemiskinan di Bangladesh.

BAB IV

SIGNIFIKANSI PENGENTASAN KEMISKINAN SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN

Bab keempat ini penulis akan menganalisis dari dua sudut pandang; (a) analisis keputusan Komite Nobel Norwegia atas penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 2006 kepada Muhammad Yunus dan Grameen Bank, (b) analisis program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Muhammad Yunus

BAB V

KESIMPULAN

Berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.